

Nama : Ananda Dermawan
NPM : 1815013023
Mata Kuliah : PKN Teknik Geodesi (S-1)
Kelas : A 107
Pertemuan : Ke-14

JAWABAN POST TEST

- A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia. Saat ini Indonesia digambarkan masih gagal dalam menangani kasus HAM, terbukti banyak kasus yang tidak kunjung mendapat keadilan. Dengan adanya kritik dengan konsep membangun, harapannya Indonesia dapat segera membenahi penegakan HAM. Hal ini menunjukkan, bahwa HAM merupakan suatu hal yang harus dijunjung tinggi demi meningkatkan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap negaranya.
- B. Demokrasi diambil dari nilai adat istiadat masyarakat asli Indonesia merupakan hal yang tepat, karena pada dasarnya adat istiadat di Indonesia senantiasa mengajarkan untuk berdemokrasi. Misalnya, dilakukannya musyawarah warga jika terdapat suatu masalah yang ingin diselesaikan, adanya kegiatan gotong royong, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan adat istiadat yang diwarisi oleh leluhur sangat mendukung prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan besarnya toleransi kepada setiap umat beragama.
- C. Pada dasarnya seluruh teori dan aturan yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan UUD 1945 diatur dengan seadil-adilnya, dan setiap warga negara Indonesia memiliki status yang sama di mata hukum. Jika berkaca pada peraturan ini, harusnya Indonesia telah menjadi negara yang menjunjung tinggi HAM. Tapi saying, dalam praktiknya Indonesia masih banyak kekurangan, terbukti dengan banyaknya kasus HAM yang dilecehkan. Tentunya hal ini menjadi pembelajaran untuk negara kita agar bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan harus lebih tegas terhadap sanksi yang menyepelekan nilai hak asasi manusia.

- D. Menurut saya hal tersebut sangat keliru. Jika anggota parlemen sudah mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat seharusnya mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan mendahulukan kepentingan rakyat, seperti itulah mereka harusnya bekerja. Jika agenda politik dilakukan berbeda dengan kepentingan rakyat tentu hal tersebut harus dipertanyakan. Pemerintah seharusnya bisa lebih transparan dalam melaksanakan agenda politik, karena negara ini memegang prinsip demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- E. Jika pihak tersebut menyalahgunakan kekuasaan kharismatiknya (digunakan untuk tujuan tidak jelas) hal tersebut tentu sangat tidak etis, karena hanya akan menyebarkan kebencian. Untuk mengatasi hal ini pemerintah harus lebih tampil ke depan untuk menepis berita tidak benar yang dilontarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab tersebut. Setiap orang memiliki hak berbicara, tetapi jika yang dibicarakan adalah menuai kebencian, mengutarakan berita bohong, dan lainnya, tentu pihak tersebut harus diproses secara hukum karena melakukan tindak criminal. Hal ini jelas berbeda dengan konsep hak berbicara yang diatur dalam HAM.